Faktor yang Mempengaruhi dan Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual yang Terjadi di Lingkungan Kampus Berdasarkan KUHP

Asmak UI Hosnah¹, Willy Faizal², R Aria Diva Risjunarko³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pakuan, Bogor

e-mail : asmakulhosnah1@gmail.com¹, willyfaizal27@gmail.com²,
divacool550@gmail.com³

Abstrak

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan masalah serius yang sangat mempengaruhi kehidupan mahasiswa dan mahasiswi secara drastis atau signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual di lingkungan kampus berdasarkan tinjauan hukum pidana (KUHP). Melalui tinjauan literatur, kami mengidentifikasi beberapa faktor, termasuk kurangnya kesadaran akan hak-hak korban kekerasan seksual, kurangnya penegakan hukum dan kurangnya perlindungan bagi korban kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus. Walau sudah banyak Pasal yang mengatur soal kekerasan seksual seperti pasal 281 s/d 296 KUHP tapi hal tersebut tidak membuat para pelaku kejahatan seksual takut karena mereka bisa memanfaatkan jabatannya dan kewenangannya untuk perlindungan diri dari hukum yang berlaku.

Kata kunci : *Kekerasan Seksual, Lingkungan Kampus, KUHP, Perlindungan Hukum.*

Abstract

Sexual violence in the tertiary environment is a serious problem that drastically or significantly affects the lives of students and students. This research aims to analyze the factors that influence sexual violence in the campus environment based on a review of criminal law (KUHP). Through a literature review, we identified several factors, including lack of awareness of the rights of victims of sexual violence, lack of law enforcement and lack of protection for victims of sexual violence on campus. Even though there are many articles that regulate sexual violence, such as articles 281 to/d 296 of the Criminal Code, but this does not make perpetrators of sexual crimes afraid because they can take advantage of their position and authority to protect themselves from the applicable law.

Keywords : *Sexual Violence, Campus Environment, Criminal Code, Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai banyak sekali universitas yang tersebar dari ujung timur hingga ujung barat wilayahnya. Tercatat ada sekitar kurang lebih 4000 universitas, baik universitas negeri maupun swasta. Kampus merupakan tempat belajar bagi mahasiswa yang dibantu dengan banyaknya tenaga pengajar yang dinamakan dosen untuk belajar sesuai minat dan juga bakat yang mereka punya pada dalam diri mereka. Hubungan dosen dan mahasiswa seharusnya merupakan hubungan yang profesional, tapi tidak jarang banyak sekali yang kita dengar bahwa banyak dosen yang menyalah gunakan kewenangannya, sehingga melakukan suatu tindakan melawan hukum, salah satunya yaitu pencabulan yang bisa dilakukan secara privat kepada mahasiswa, yang dimana banyak sekali kasus tersebut terjadi di banyak universitas, kasus pencabulan tersebut jarang di publish karna banyak

korban mahasiswa yang tidak berani buka suara atau takut berbicara. Hal ini dikarenakan adanya ancaman-ancaman tertentu yang diberikan oleh dosen tersebut.

Kekerasan Seksual yang terjadi di Kampus adalah perbuatan yang sangat memprihatinkan. Kampus adalah tempat untuk mencari atau menuntut ilmu yang tinggi, tetapi tidak hanya menuntut ilmu, tapi juga untuk menjunjung etika dan moral, dan bebas dari tindakan pencabulan. Maka dari itu, Indonesia mestinya menunggunakan Hukum nya untuk mencapai tujuannya sebagai Negara yang berlandaskan Hukum, dikarenakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum sesuai pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Ada sedikit perbedaan diantara pelecehan seksual, pencabulan, dan juga kekerasan seksual yang mungkin banyak dari masyarakat Indonesia yang masih kurang mengerti apa perbedaan dari ketiga hal tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Soetandy Wignjosoebroto, "Pencabulan adalah upaya laki-laki untuk mengungkapkan hasrat seksualnya terhadap perempuan dengan cara melanggar adat istiadat atau huku yang berlaku". Dari sudut pandang ini, amoralitas seksual di satu sisi adalah tindakan atau perilaku laki-laki yang mengungkapkan hasrat seksual terhadap seorang perempuan, dan tindakan tersebut tidak bermoral dan dilarang oleh hukum yang berlaku. R. Sugandi berasumsi bahwa pelecehan seksual adalah : sebelum ejakulasi terjadi."

Dan pengertian kekerasan seksual sendiri adalah "kekerasan yang bersifat seksual yang berbagai jenis perilaku tidak diinginkan yang bernuansa seksual, disebut juga pelecehan seksual, dan berbagai bentuk hubungan seksual paksa, disebut juga pemerkosaan."(Affandi, 2010 : 86). Dari beberapa definisi yang ada tentu saja hal ini sangat memperhatikan bagi para mahasiswa khususnya yang berkuliah jauh dari lingkungan keluarganya atau bahkan diluar pulau kelahirannya. Meskipun sudah banyak pasal yang mengatur tentang Pelecehan dan Kekerasan seksual di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada pada pasal 281 s/d 296 KUHP, Pelecehan seksual tetap menjadi momok yang bisa dibilang menjamur di beberapa universitas dengan oknum-oknum dosen yang tidak bertanggung jawab sebagai pelaku utamanya. Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya normalisasi dari sebagian penghuni kampus ada juga ketidak beranian dari sang korban untuk berbicara atau melaporkannya kepada pihak yang berwenang untuk masalah ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau kepustakaan, dengan kata lain penelitian dilakukan dengan cara meneliti/mengkaji bahan pustaka atau data sekunder. Contoh dari data sekundernya antara lain :

- Bahan hukum primer, terdiri dari Peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini mencakup : KUHP, dan peraturan tertulis lain yang terkait.
- Bahan hukum sekunder dimana isinya menjelaskan isi dari bahan hukum primer yang berasal dari karya-karya tulis atau jurnal dari para pakar hukum

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Di Area Kampus Universitas

Ada faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

Pertama, karena hubungan antar korban dan pelaku tidak setara. Maksud dari tidak setara adalah dimana pengajar atau dosen dipandang lebih unggul dan mahasiswa dianggap lebih inferior.

Kedua, adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh dosen dan staf kampus. Fakultas atau kampus yang gagal menjaga integritas dan menggunakan posisinya untuk melakukan tindakan yang berdampak negatif terhadap mahasiswa.

Ketiga, janji atau insentif tertentu yang diberikan pelaku pada korban, dimana instruktur atau dosen dapat menipu korban dengan tampil mesra untuk menyembunyikan niat seksualnya

Keempat, Faktor lingkungan yang tidak mendukung juga dapat memicu terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual. Terlebih lagi, saat ini kita sering melihat berapa banyak anak-anak dalam masyarakat mengambil jalan yang salah dan berani melakukan hal-hal diluar kendali mereka. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam berhubungan dengan orang lain, memilih lingkungan dan jangkauan yang baik, serta memilih teman dan kerabat yang baik.

Dari beberapa faktor diatas menunjukkan bahwa lingkungan tempat belajar dan menimba ilmu pun tidak terlepas dari tindak pidana yang dilakukan para oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu untuk mempersempit kesempatan tindak pidana itu terjadi kita harus

Jenis Kekerasan Seksual Yang Berpotensi Terjadi Di Lingkungan Kampus Dan Uu Yang Mengaturnya

Tentu saja ada banyak macam tindak pidana yang sangat rentan dan sering kita dengar terjadi di lingkungan kampus. Walau hampir serupa ternyata banyak unsur-unsur yang berbeda dari setiap tindak kejahatan pidana yang dilakukan. Berikut merupakan pasal-pasal di dalam KUHP dengan unsur-deliknya yang bisa berpotensi terjadi di lingkungan kampus.

- a) *Pasal 281 KUHP tentang kejahatan yang melanggar asusila umum;*
- b) *Pasal 282 KUHP tentang kejahatan pornografi;*
- c) *Pasal 285 KUHP tentang kejahatan perkosaan untuk bersetubuh;*
- d) *Pasal 286 KUHP tentang tindak pidana melakukan hubungan seksual dengan perempuan diluar perkawinan yang dalam kondisi tidak sadar atau tidak berdaya;*
- e) *Pasal 288 KUHP tentang tindak pidana melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang belum memenuhi syarat untuk menikah dan menyebabkan cedera;*
- f) *Pasal 297 KUHP Tentang Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa*
- g) *Pasal 299 KUHP tentang Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat gugurkan*

Perlindungan Hukum Bagi Korban

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 mengatur hak setiap individu untuk terlindungi dari perlakuan yang merendahkan martabat, langkah-langkah pencegahan, serta pemberian kompensasi kepada korban pelecehan seksual. Undang-undang ini merupakan kerangka hukum yang bertujuan melindungi korban kekerasan seksual.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan/pelecehan seksual telah menjadi permasalahan domestik dan internasional, dan penyelesaian kasus harus dilakukan secara hati-hati. Penyelenggaraan perlindungan korban merupakan perwujudan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. TPKS justru memberikan kesulitan terbesar dalam penyelesaian perkara, baik di dalam tahap investigasi, penuntutan, maupun pengambilan keputusan. Diluar dari kesulitan-kesulitan yang telah dijelaskan di atas, terdapat juga kesulitan dalam pembuktian kasus-kasus seperti perbuatan asusila dan pencabulan, yang biasanya ketika tidak ada orang lain yang hadir di TKP sehingga sulit dibuktikan. Terkait dengan melindunginya korban-korban beserta saksi-saksi yang terlibat kekerasan seksual di lingkungan kampus. Diberikannya perlindungan secara yuridis kepada para korban dan saksi, serta Dosen-dosen, petugas kampus yang terlibat kasus TPKS berdasarkan Pasal 12. Macam-macam perlindungan yang diberikan kepada korban atau saksi dilihat dari pasal ini yaitu :

- 1) Menjaminnya kelangsungan sampai pelatihan dari mahasiswa bisa diselesaikan;
- 2) Menjaminnya kelanjutan mata pencaharian sebagai dosen dan atau petugas kependidikan pada universitas;
- 3) Menyediakan jaminan untuk melindungi individu dari kekerasan yang bersifat seksual, baik dalam bentuk ancaman fisik maupun non-fisik, serta mewadahi pelaporan ancaman tersebut kepada pihak yang berwenang dalam penegakan hukum.;
- 4) Menjaminnya rahasia dari identitas tetap terlindungi;

- 5) Memberikan pengetahuan tentang hak kepemilikan dan opsi yang berbeda;
- 6) Memberikan kemampuan untuk memperoleh informasi tentang praktek-praktek perlindungan;
- 7) Menjamin agar korban tidak diabaikan atau diperlakukan secara tidak hormat oleh aparat penegak hukum, serta mencegah penguatan prarsangka dalam perilaku mereka;
- 8) Perlindungan korban menjamin agar korban atau pelapor tidak dituntut atau dikejar hukum ;
- 9) Tindakan hukum sipil terhadap laporan insiden kekerasan seksual;
- 10) Menyediakan fasilitas yang memberikan perlindungan dan keamanan;
- 11) Pernyataan yang dikeluarkan mengacu pada perlindungan perdamaian dan kebebasan dari ancaman.

Walaupun hukuman pidana yang berat tidak selalu bisa sepenuhnya menghilangkan tindak pidana tersebut secara keseluruhan, tapi hal ini mungkin berkaitan dengan berat ringannya hukuman atas perbuatan tersebut berdasarkan pandangan masyarakat. Hal yang sama juga berlaku bila tujuan pendanaan adalah untuk pencegahan umum. Jika hukuman pidananya ringan, tidak perlu melakukan pelecehan seksual. Apabila masyarakat tidak merasa takut, praktik-praktik semacam itu akan terus meluas dan akan berdampak negatif pada perlindungan masyarakat. Keterjagaan solidaritas masyarakat dalam mencegah pidana pelecehan seksual telah terganggu, dan hukuman pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian yang diderita korban akibat tindak kriminal tersebut.

SIMPULAN

Kekerasan yang bersifat seksual, seperti berbagai macam perbuatan yang tidak diinginkan atau juga bernuansa seksual yang bisa disebut juga dengan pelecehan seksual, dan berbagai bentuk pemaksaan kepada orang lain atau hubungan seksual yang juga disebut dengan pemerkosaan. Kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan mana saja, termasuk di kampus, dan banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus yaitu seperti :

- a. Hubungan antara pelaku dan korban tidak setara
- b. Adanya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang
- c. Pelaku yang menjanjikan sesuatu pada korban
- d. Lingkungan yang terbiasa menormalisasi hal tersebut.

Dan sering terjadi di lingkungan kampus, tetapi adanya kekurangan bagi perlindungan terhadap si korban, karena adanya kelemahan aturan atau tindakan penyelidikan yang tidak tegas, sehingga si korban tidak berani membuka suara karena kurangnya dukungan untuk menindak lanjuti kasus atau kampanye demonstrasi untuk mencegah kekerasan seksual yang terjadi di kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ngawiardi "Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Parigi Moutong". <https://media.neliti.com/media//publication/145804-ID-kajian-kriminologi-terhadap-kejahatan-pe.pdf> Diakses pada tanggal 19 April 2024.
- "Kekerasan Seksual – Merdeka dari Kekerasan" <http://repository.unimus.ac.id/2596/3/16.%20BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 20 April 2024
- Irfawandi, dkk "Analisis Jenis-Jenis Dan Penyebab Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus" <https://japendi.publikasiindonesia.id/index.php/japendi/article/view/1747/1095> diakses pada 20 April 2024
- Faizah, dkk "Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban" <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/Al-Athfal/article/download/88/615> Diakses pada 20 April 2024
- Sumera, Marcheyla "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan" <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1748>

Desi, dkk “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual” <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/al-qisth/article/view/16815> diakses pada tanggal 21 April 2024

Marpaung, Leden “Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensi nya”, Sinar Grafika Jakarta, 1996

Alpian, Ryan. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual Di PerguruanTinggi. <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/22029> Diakses pada tanggal 21 April 2024